




Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara

Dwi Susanti 

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

E-mail: dwisusanti.7232441001@unimed.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Kata Kunci:
*Pertumbuhan
Ekonomi, Inflasi,
Tingkat Kemiskinan,
Sumatera Utara,
Regresi Linier
Berganda.*

©2026 Dwi Susanti.

This is an open-access article under the This work is licensed under a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

[Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah orang miskin di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2007–2020. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menentukan sejauh mana faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah dengan struktur ekonomi yang beragam antara daerah perkotaan dan pedesaan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS), dan dilengkapi dengan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas $0,0006 < 0,05$, yang berarti setiap peningkatan 1 persen pengangguran meningkatkan jumlah orang miskin sebesar 0,0419 persen. Sementara itu, inflasi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas $0,0305 < 0,05$, di mana setiap kenaikan 1 persen inflasi meningkatkan jumlah orang miskin sebesar 0,0722 persen. Secara bersamaan, inflasi dan pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai R-Squared sebesar 0,6684. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja sebagai upaya strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Submitted: 18-10-2025. Revision: 28-02-2026. Approved: 06-06-2026. Published: 25-06-2026

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah klasik yang masih dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan ekonomi tetapi juga mencerminkan rendahnya kualitas hidup masyarakat akibat pendapatan yang terbatas dan akses yang terbatas terhadap kebutuhan dasar. Menurut Todaro dan Smith (2012), kemiskinan tidak hanya diukur dengan kurangnya pendapatan tetapi juga dengan terbatasnya kesempatan untuk pendidikan, layanan kesehatan, dan partisipasi ekonomi. ([Ningrum et al., 2020](#))

Di Indonesia, kemiskinan adalah isu sentral dalam pembangunan ekonomi karena erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu provinsi yang masih menghadapi tantangan dalam pengentasan kemiskinan adalah Sumatera Utara, yang memiliki karakteristik heterogen antara daerah perkotaan dan pedesaan. Faktor makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran terbuka sering kali menjadi penyebab utama fluktuasi jumlah orang miskin di wilayah ini. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan rumah tangga. Kedua faktor ini memiliki potensi untuk memperburuk kemiskinan jika tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang tepat. (Sembiring et al., 2021)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), orang miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluaran per kapita bulanan mereka berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu sendiri ditentukan berdasarkan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan untuk standar hidup yang layak.

Penelitian oleh Sukirno (2016) menyatakan bahwa jumlah orang miskin dapat meningkat jika ada tekanan inflasi yang signifikan dan peningkatan tingkat pengangguran yang tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru. Dengan demikian, jumlah orang miskin mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi suatu daerah.



Gambar 1. Perkembangan jumlah orang miskin di Sumatera Utara tahun 2013 – 2024

Menurut Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (No. 41/07/12/Th. XXVII, 1 Juli 2024), jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2024 tercatat sebanyak 1,228 juta, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 1,240 juta. Dibandingkan dengan Maret 2022, yang mencapai 1,268 juta, penurunan ini menunjukkan tren perbaikan kesejahteraan masyarakat, meskipun tetap relatif fluktuatif.

Secara umum, sejak pandemi COVID-19 pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Sumatera Utara telah meningkat akibat melambatnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, tingkat kemiskinan mulai menurun lagi dari tahun 2022 hingga 2024.

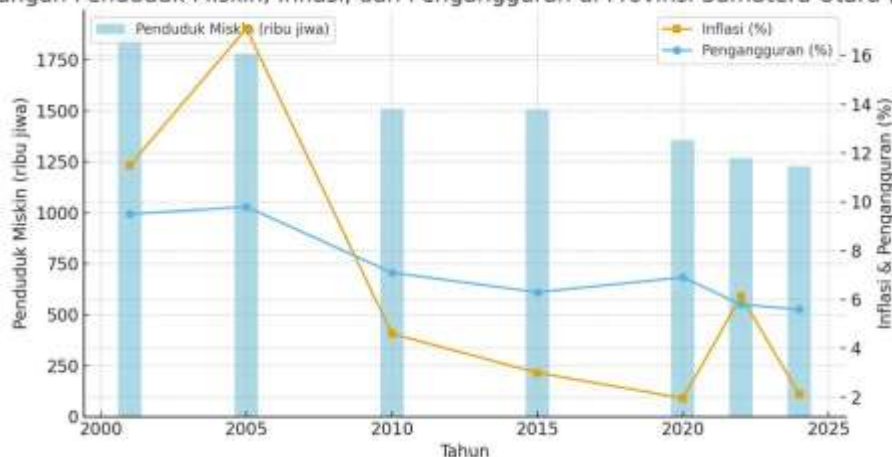
Data inflasi di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan angka 1,96% (2020), 1,71% (2021), 6,12% (2022), 2,25% (2023), dan 2,12% (2024) (BPS, 2025). Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara pada Agustus 2024 tercatat sebesar 5,60%, mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika kemiskinan di Sumatera Utara tidak terlepas dari pengaruh inflasi dan pengangguran. Ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat menurun; sementara meningkatnya pengangguran menekan pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, menganalisis efek inflasi dan pengangguran terhadap jumlah orang miskin penting untuk memahami efektivitas kebijakan ekonomi regional dalam mengurangi kemiskinan. ([Ise et al., 2022](#))

Selama periode 2001–2024, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan, dari sekitar 1,9 juta menjadi 1,23 juta orang. Namun, penurunan tersebut tidak selalu stabil karena fluktuasi inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Pada tahun 2005, inflasi mencapai 17,1% akibat kenaikan harga energi, menyebabkan daya beli menurun dan jumlah orang miskin meningkat. Sebaliknya, pada tahun 2010–2015, ketika inflasi dikendalikan pada kisaran 3–4%, tingkat kemiskinan menurun seiring dengan meningkatnya stabilitas ekonomi regional. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 meningkatkan TPT menjadi 6,91%, tetapi pada tahun 2024, TPT turun menjadi 5,6%, seiring dengan inflasi yang menurun menjadi 2,12%.

Menurut Todaro (2000), pengangguran adalah faktor penyumbang utama kemiskinan karena mengurangi pendapatan rumah tangga dan daya beli. Sementara itu, Mankiw (2003) menjelaskan bahwa inflasi yang tinggi meningkatkan garis kemiskinan karena naiknya harga kebutuhan pokok. Pola ini terlihat jelas di Sumatera Utara, di mana inflasi yang meningkat dan pengangguran sering disertai dengan peningkatan kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) (2024), hubungan antara ketiga variabel ini menunjukkan bahwa mengendalikan inflasi dan menciptakan lapangan kerja tetap menjadi kunci untuk mengurangi kemiskinan di wilayah ini. ([Rumate & Engka, 2019](#))

Secara makroekonomi, hubungan antara inflasi dan pengangguran dijelaskan oleh Kurva Phillips, yang menunjukkan hubungan terbalik antara keduanya. Dalam konteks Sumatera Utara, periode 2001–2024 menunjukkan pola di mana ketika pengangguran menurun dan inflasi stabil, tingkat kemiskinan juga menurun.

Perkembangan Penduduk Miskin, Inflasi, dan Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara (2001–2024)



Selama periode 2001–2024, kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan tren penurunan yang bertahap, dari sekitar 1,9 juta orang menjadi 1,23 juta. Penurunan ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan dan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, subsidi energi, dan peningkatan investasi daerah. Namun, tren ini tidak sepenuhnya stabil, dengan beberapa fluktuasi sejalan dengan perubahan inflasi dan tingkat pengangguran terbuka (TPT):

Pada tahun 2005, inflasi melonjak menjadi 17,1% akibat kenaikan harga bahan bakar dan makanan nasional. Akibatnya, tingkat kemiskinan meningkat karena daya beli masyarakat menurun drastis.

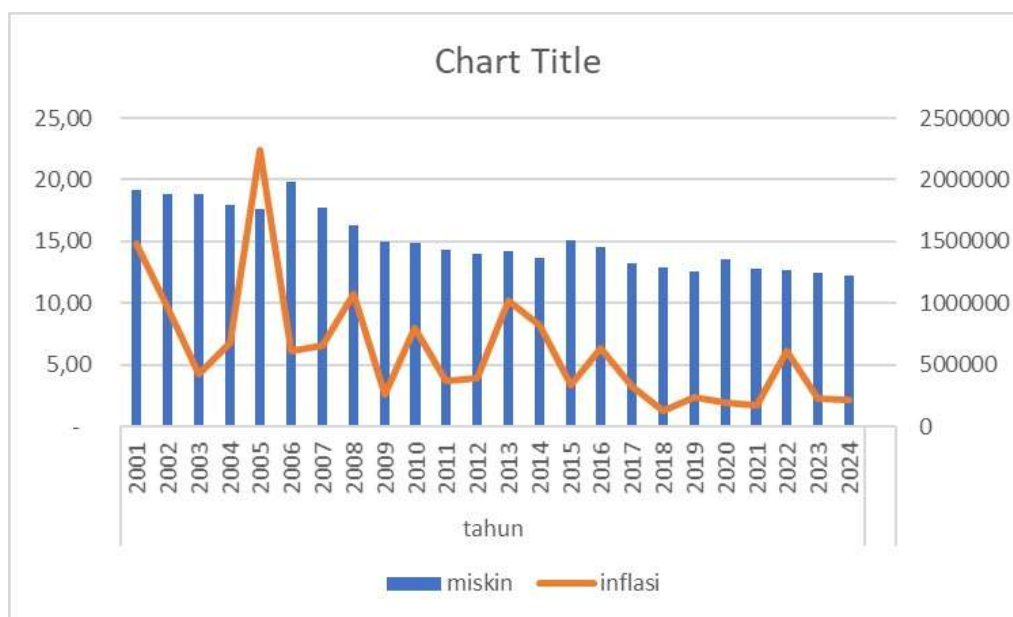
Pada tahun 2010–2015, inflasi dikendalikan pada kisaran 3–4%, dan tingkat kemiskinan mulai menurun seiring meningkatnya stabilitas ekonomi regional.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan pengangguran (TPT 6,91%) dan sedikit memperlambat laju penurunan kemiskinan.

Pada tahun 2022, inflasi melonjak menjadi 6,12% akibat krisis energi global dan gangguan rantai pasokan makanan. Namun, angka tersebut berhasil diturunkan menjadi 2,12% pada tahun 2024, bersamaan dengan penurunan TPT menjadi 5,6%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase dari populasi usia kerja yang menganggur tetapi mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja (BPS, 2024). Pengangguran menunjukkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Menurut Todaro (2000), pengangguran bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial karena mengurangi produktivitas dan memperlebar kesenjangan pendapatan. ([Lestari & Nilasari, 2025](#))

Secara logis, meningkatnya pengangguran akan mengurangi pendapatan rumah tangga dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga meningkatkan tingkat kemiskinan. Sukirno (2016) menjelaskan bahwa jika peluang kerja menurun, pendapatan nasional juga akan menurun, sehingga jumlah orang miskin akan meningkat. Penelitian oleh Nasution & Lubis (2023) dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* menunjukkan bahwa tingkat pengangguran (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. ([Firmansyah & Arizal, 2025](#))



Grafik tersebut menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan dan inflasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001–2024. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan, dari sekitar 18–20 persen pada awal 2000-an menjadi sekitar 9–10 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan publik, meskipun secara bertahap. Sementara itu, tingkat inflasi cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2005, yang diduga disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar dan tekanan pada harga kebutuhan pokok. Setelah periode tersebut, inflasi relatif lebih terkontrol, terutama dalam lima tahun terakhir, di mana inflasi cenderung tetap stabil di bawah lima persen.

Secara umum, hubungan antara kedua variabel menunjukkan bahwa ketika inflasi meningkat tajam, laju pengurangan kemiskinan melambat. Ini terjadi karena kenaikan harga barang dan jasa mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, ketika inflasi menurun, pengurangan kemiskinan menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki efek positif terhadap kemiskinan, dengan meningkatnya inflasi berpotensi memperburuk kemiskinan jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. (Ningsih, 2019)

Berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan korelasi yang kuat antara tingkat pengangguran dan kemiskinan. Secara teoretis, menurut Todaro (2000), meningkatnya pengangguran akan mengurangi pendapatan rumah tangga dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga meningkatkan jumlah orang miskin. Mankiw (2003) juga menjelaskan bahwa tingginya pengangguran akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif. (Novianto, 2018)

Namun, penelitian empiris di berbagai daerah menunjukkan adanya kesenjangan penelitian mengenai arah dan kekuatan pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan. Misalnya, penelitian oleh Nasution & Lubis (2023) di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dengan setiap peningkatan 1% pengangguran meningkatkan jumlah orang miskin sebesar 0,35%. Temuan ini mengonfirmasi bahwa meningkatnya pengangguran secara langsung memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga miskin. (Sangkaen et al., 2018)

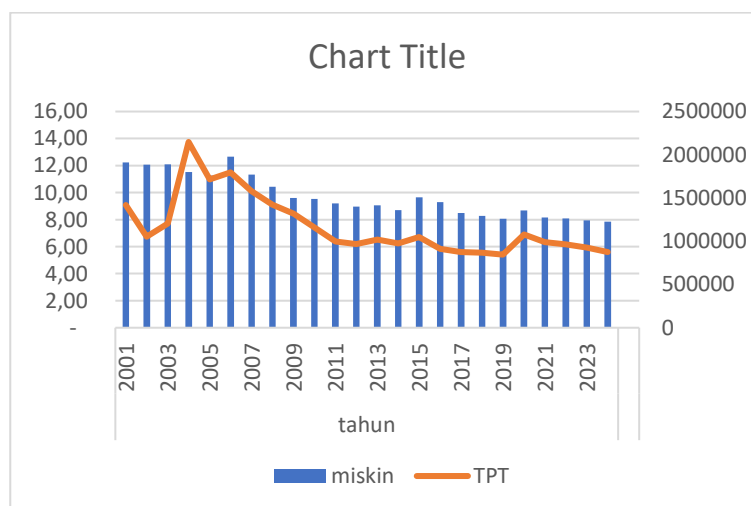
Bertentangan dengan temuan ini, Siregar (2020), yang meneliti Provinsi Jawa Barat, menemukan bahwa pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, karena sebagian besar orang mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi melalui sektor informal atau pekerjaan paruh waktu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi dan

peran sektor informal di setiap daerah adalah faktor penentu yang memoderasi hubungan antara pengangguran dan kemiskinan. (Rizani et al., 2023)

Dengan demikian, masih ada kesenjangan penelitian mengenai bagaimana karakteristik pengangguran di daerah dengan struktur ekonomi yang beragam seperti Sumatera Utara mempengaruhi kemiskinan. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami apakah jenis pengangguran yang dominan (struktural, friksional, atau terselubung) juga menentukan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kemiskinan di wilayah tersebut. (Utomo, 2012)

Inflasi adalah proses peningkatan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu (Mankiw, 2003). Di Indonesia, inflasi sering disebabkan oleh kenaikan harga makanan, energi, dan transportasi (BPS, 2023). Inflasi tinggi mengurangi daya beli masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpendapatan rendah.

Secara logis, ketika inflasi meningkat, harga barang dan jasa naik sementara pendapatan riil masyarakat tetap konstan, sehingga mengurangi daya beli dan mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan. Menurut Mankiw (2003), inflasi yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah akan memperburuk kesejahteraan orang miskin. Penelitian oleh Sari & Ginting (2022) dalam *Journal of Economic Paradigm* menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, khususnya dalam konsumsi makanan rumah tangga.



Grafik tersebut menunjukkan perkembangan jumlah orang miskin dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2001–2024. Berdasarkan grafik, jumlah orang miskin (ditunjukkan oleh batang biru) mengalami tren penurunan yang bertahap dari awal periode hingga 2024. Pada awal tahun 2000-an, jumlah orang miskin masih cukup tinggi, tetapi terus menurun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan efektivitas berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT), yang digambarkan dengan garis oranye, menunjukkan pola yang berfluktuasi, dengan puncak tertingginya terjadi pada tahun 2005. Peningkatan ini kemungkinan terkait dengan perubahan dalam struktur ekonomi nasional dan kondisi ketenagakerjaan. Sejak saat itu, tingkat pengangguran secara bertahap menurun dan cenderung stabil di kisaran 5–7 persen dalam beberapa tahun terakhir.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran meningkat, jumlah orang miskin cenderung meningkat, sementara ketika pengangguran menurun, jumlah orang miskin menurun. Ini menunjukkan adanya hubungan positif antara pengangguran dan kemiskinan, di mana meningkatnya pengangguran meningkatkan risiko kemiskinan akibat menurunnya pendapatan dan daya beli. Oleh karena itu, upaya untuk

mengurangi tingkat pengangguran merupakan faktor penting dalam mengurangi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Secara teoritis, inflasi sangat terkait dengan kemiskinan karena mempengaruhi daya beli masyarakat. Mankiw (2003) menjelaskan bahwa kenaikan harga barang dan jasa tanpa peningkatan pendapatan riil yang sebanding akan mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. Demikian pula, Boediono (2014) menegaskan bahwa inflasi yang tinggi akan memperlebar ketimpangan sosial karena tekanan harga dirasakan lebih parah oleh orang miskin, yang sebagian besar pendapatannya dihabiskan untuk konsumsi makanan. (Priyanto, 2005)

Namun, penelitian empiris di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa efek inflasi terhadap kemiskinan tidak selalu konsisten, menciptakan celah penelitian yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Penelitian oleh Sari & Ginting (2022) di Provinsi Sumatera Utara menemukan bahwa inflasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan—setiap kenaikan inflasi sebesar 1% dapat meningkatkan jumlah orang miskin sekitar 0,27%. Kenaikan harga makanan dan energi adalah faktor utama yang menekan daya beli rumah tangga miskin.

Sebaliknya, Hutabarat (2020) menemukan temuan yang berbeda: inflasi moderat sebenarnya dapat mengurangi kemiskinan dengan mendorong peningkatan produksi dan lapangan kerja. Hasil ini menunjukkan bahwa dampak inflasi terhadap kemiskinan tidak bersifat linier, tetapi bergantung pada karakteristik inflasi (makanan vs. non-makanan), adaptabilitas pendapatan masyarakat, dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga.

Oleh karena itu, masih ada kesenjangan dalam penelitian empiris tentang bagaimana tingkat inflasi tertentu, terutama inflasi makanan di daerah seperti Sumatera Utara, secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan orang miskin. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menjelaskan apakah inflasi moderat sebenarnya dapat produktif atau apakah inflasi tersebut terus memperburuk kemiskinan ketika tidak disertai dengan kebijakan pengendalian harga dan peningkatan pendapatan riil.

Penelitian ini menarik untuk dipelajari karena membahas isu-isu makroekonomi klasik tentang inflasi dan pengangguran, tetapi menempatkannya dalam konteks kontemporer dan lokal, yaitu Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki karakteristik ekonomi yang beragam antara daerah perkotaan dan pedesaan. Meskipun efek inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan telah banyak dibahas dalam literatur ekonomi, hasilnya tetap tidak konsisten, terutama di tingkat regional. Beberapa studi menemukan bahwa pengangguran secara signifikan meningkatkan kemiskinan, sementara yang lain menunjukkan bahwa efeknya tidak selalu signifikan karena peran kuat sektor informal. Demikian pula, inflasi, di satu sisi, dapat memperburuk kesejahteraan orang miskin, tetapi dalam kondisi tertentu justru mendorong aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.

Keunikan penelitian ini terletak pada periode analisis jangka panjangnya (2001–2024), yang memungkinkan untuk menangkap dinamika struktural ekonomi Sumatera Utara, termasuk dampak pandemi COVID-19, krisis harga pangan global, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Dengan menggabungkan data makroekonomi BPS dengan teori pembangunan seperti Todaro (2000) dan Mankiw (2003), penelitian ini tidak hanya meneliti hubungan statistik tetapi juga meneliti bagaimana perubahan inflasi dan pengangguran secara kolektif membentuk pola kemiskinan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pembuatan kebijakan daerah, khususnya dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang efektif dan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan di Sumatera Utara.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, mencakup beberapa variabel, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan inflasi. Penelitian ini dilakukan

menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan adalah data deret waktu yang mencakup 14 tahun, dari tahun 2007 hingga 2020.

Oleh karena itu, fungsi-fungsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: $PMIS = (PGG, INF)$ (1) Dari persamaan 1, yang ditentukan dalam model dan diubah menjadi bentuk logaritmik dalam persamaan berikut:

$$L (PMIS)\beta_0 - \beta_1 L (PGG) + B_2 L (INF) + e$$

Information:

PMIS = Poor Population (People)

TPT = Unemployment (People)

INF = Inflation (Percent)

L = Logarithm

Bo = Constant

$\beta_1 - \beta_2$ = Regression coefficient

e = Interference variable (error term)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS). Uji asumsi yang digunakan meliputi uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Hasil penelitian ini meneliti efek parsial, efek simultan, dan koefisien determinasi. Semua pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Eviews 12.

3. HASIL DAN DISKUSI

A. Hasil

1. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji Normalitas. Kriteria untuk nilai Jacque Bera Prob. (JB) $> 0,05$ berarti H_0 ditolak, yang berarti tidak ada penyimpangan dari asumsi normalitas atau gangguan/residu terdistribusi normal. Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa Jarque Bera Prob. adalah $0,796 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran uji normalitas dalam model penelitian ini.
- b. Uji Autokorelasi. Hasil Uji Autokorelasi Serial Breusch-Godfrey LM dengan kriteria bahwa jika nilai Obs*R-squared prob. $> 0,05$, maka tidak ada gejala autokorelasi dalam penelitian ini. Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa Prob. adalah $0.4552 > 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran uji autokorelasi dalam model penelitian ini.
- c. Uji Heteroskedastisitas. Hasil Breusch-Pagan-Godfrey: Uji Heteroskedastisitas dengan kriteria jika nilai Prob. Obs R-squared $> 0,05$, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini. Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa Prob. adalah $0,0680 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran uji heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.
- d. Uji Multikolinearitas. Hasil uji Variance Inflation Factors dengan kriteria jika nilai Centered VIF < 10 , maka tidak ada pelanggaran uji multikolinearitas dalam model penelitian ini. Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa nilai Centered VIF adalah $(1,36; 1,36) < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran uji multikolinearitas dalam model penelitian ini.

The results of the assumption tests and hypothesis tests of the OLS regression model in this study are summarized in Table 1 below:

Dependent Variable: LOG(MISKIN)
 Method: Least Squares
 Date: 10/06/25 Time: 13:58
 Sample: 2001 2024
 Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.79276	0.070568	195.4532	0.0000
LOG(INFLASI)	0.072256	0.031141	2.320285	0.0305
TPT	0.041980	0.010491	4.001456	0.0006
R-squared	0.668446	Mean dependent var	14.22082	
Adjusted R-squared	0.636869	S.D. dependent var	0.156840	
S.E. of regression	0.094512	Akaike info criterion	-1.763705	
Sum squared resid	0.187584	Schwarz criterion	-1.616449	
Log likelihood	24.16447	Hannan-Quinn criter.	-1.724638	
F-statistic	21.16905	Durbin-Watson stat	1.232391	
Prob(F-statistic)	0.000009			

2. Pengujian Hipotesis

- Uji simultan, secara umum variabel pengangguran dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan Probabilitas $0.000 < 0.05$, sehingga H_0 diterima.
- Uji parsial, terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel pengangguran terhadap variabel kemiskinan di Sumatera Utara dengan probabilitas $0.0006 < 0.05$ maka H_0 diterima. Ada pengaruh positif dan signifikan dari variabel inflasi terhadap variabel kemiskinan di Sumatera Utara dengan probabilitas $0,0305 < 0,05$ maka H_0 diterima.

3. Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 1 di atas, nilai R-Squared adalah 0,6684, yang berarti bahwa 66,84 persen kontribusi jumlah orang miskin dapat dijelaskan oleh pengangguran dan inflasi. Sementara 31,16 persen sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

4. Diskusi model analisis

Persamaan regresi yang dihasilkan dari model penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$L \text{ (PMIS)} = 13.7927 + 0.0722 L \text{ (INFLASI)} + 0.0419 \text{ (PENGANGGURAN)} + e$$

Berdasarkan koefisien di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- Konstanta 13.7927 menunjukkan bahwa jika variabel independen seperti inflasi dan pengangguran konstan, maka jumlah orang miskin di Sumatera Utara adalah 13,792 persen.
- Setiap kenaikan 1 persen inflasi akan meningkatkan jumlah orang miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,0722 persen dengan asumsi ceteris paribus.
- Setiap kenaikan 1 persen dalam tingkat pengangguran akan meningkatkan jumlah orang miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,0419 persen, dengan asumsi ceteris paribus.

B. Diskusi

Variabel Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, Hasil uji hipotesis parsial dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai probabilitas $0,0006 < 0,05$. Ini berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam tingkat pengangguran akan meningkatkan jumlah orang miskin sebesar 0,0419 persen, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan (ceteris paribus). Dengan demikian, hipotesis bahwa

pengangguran memiliki efek positif terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara terbukti benar.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang diajukan oleh Todaro (2000), yang menyatakan bahwa pengangguran adalah salah satu penyebab utama kemiskinan karena menurunnya pendapatan rumah tangga dan menurunnya daya beli. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, sehingga menurunkan kesejahteraan rumah tangga. Mankiw (2003) juga menekankan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah produktivitas nasional dan pendapatan agregat masyarakat.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nasution dan Lubis (2023) dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, yang menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Setiap peningkatan 1% dalam TPT menyebabkan peningkatan 0,35% dalam jumlah orang miskin. Temuan ini menunjukkan bahwa menciptakan lapangan kerja berkualitas adalah kunci untuk pengentasan kemiskinan di provinsi ini.

Temuan serupa diperoleh oleh Primandari (2018) dan Mufidah et al. (2022), yang menyatakan bahwa meningkatnya pengangguran akan meningkatkan tingkat kemiskinan karena menurunnya pendapatan mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Arsyad (2010) menjelaskan bahwa ada hubungan erat antara tingkat pengangguran, luasnya kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin besar risiko meningkatnya ketimpangan sosial. (Primandari, 2018)

Situasi ini jelas terlihat di Provinsi Sumatera Utara, di mana, meskipun tingkat pengangguran menurun pasca-pandemi COVID-19 dari 6,91% (2020) menjadi 5,60% (2024), pengurangan kemiskinan tidak selalu signifikan. Ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan, karena sebagian besar pekerjaan baru yang tercipta bersifat informal dan bergaji rendah. Fenomena ini memperkuat argumen Simanjuntak (2001) bahwa pengangguran di negara-negara berkembang sering kali bersifat struktural, terjadi karena ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja.

Namun, terdapat kesenjangan penelitian ketika membandingkan hasil studi ini dengan studi di daerah lain. Siregar (2020), dalam penelitiannya di Provinsi Jawa Barat, menemukan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena beberapa orang mampu beradaptasi melalui sektor informal. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan kemiskinan sangat bergantung pada struktur ekonomi regional, kekuatan sektor informal, dan kualitas pekerjaan yang tersedia.

Dengan demikian, studi ini memperkuat bukti empiris bahwa pengangguran tetap menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Namun, untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan dan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Variabel Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai probabilitas $0,0305 < 0,05$. Ini berarti bahwa setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen akan meningkatkan jumlah orang miskin sebesar 0,0722 persen. Dengan demikian, hipotesis bahwa inflasi memiliki efek positif terhadap kemiskinan secara empiris terbukti benar.

Hasil penelitian ini mendukung teori Mankiw (2003), yang menyatakan bahwa inflasi tinggi akan meningkatkan garis kemiskinan karena harga barang dan jasa naik sementara pendapatan riil masyarakat tetap konstan. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, dan lebih banyak rumah tangga jatuh di bawah garis kemiskinan. Boediono (2014) juga menekankan

bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat memperlebar ketimpangan ekonomi karena beban kenaikan harga paling berat ditanggung oleh kelompok berpendapatan rendah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Sari dan Ginting (2022) dalam *Journal of Economic Paradigm*, yang menunjukkan bahwa inflasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di sektor konsumsi makanan rumah tangga. Setiap kenaikan inflasi sebesar 1% meningkatkan jumlah orang miskin sebesar 0,27%. Ini karena orang miskin mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan energi, sehingga mereka lebih rentan terhadap fluktuasi harga. ([Sari & Wulansari, 2022](#))

Selain itu, penelitian ini sejalan dengan temuan studi oleh Primandari (2018), Ningsih dan Andiny (2018), serta Mardiatillah et al. (2019), yang menunjukkan bahwa inflasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kemiskinan karena kenaikan harga menyebabkan penurunan konsumsi dan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika inflasi meningkat, nilai riil pendapatan menurun, sehingga semakin sulit bagi rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar. ([Primandari, 2019](#))

Kondisi di Sumatra Utara memperkuat bukti ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (2025), inflasi di provinsi ini berfluktuasi dari 1,96% pada tahun 2020, 1,71% pada tahun 2021, kemudian meningkat tajam menjadi 6,12% pada tahun 2022, dan kemudian turun lagi menjadi 2,12% pada tahun 2024. Kenaikan tajam pada tahun 2022 akibat krisis energi global menyebabkan lonjakan harga makanan dan energi, yang langsung berdampak pada orang miskin. Penurunan inflasi pada tahun 2023–2024 tidak serta merta akan meningkatkan kesejahteraan karena harga kebutuhan pokok sudah tinggi dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. ([Mardiatillah et al., 2021](#))

Namun, terdapat kesenjangan penelitian ketika hasil ini dibandingkan dengan studi Hutabarat (2020), yang menemukan bahwa inflasi moderat sebenarnya dapat mengurangi kemiskinan dengan mendorong peningkatan produksi dan lapangan kerja. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh inflasi terhadap kemiskinan tidak selalu linier, melainkan bergantung pada jenis inflasi (makanan vs. non-makanan), kemampuan penyesuaian pendapatan masyarakat, dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. ([Hutabarat et al., 2025](#))

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Utara secara signifikan memperburuk kemiskinan, terutama pada periode ketika harga kebutuhan pokok naik dengan cepat tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan. Studi ini menutup kesenjangan penelitian empiris dengan mengonfirmasi bahwa dampak inflasi terhadap kemiskinan di tingkat regional sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal dan ketahanan konsumsi rumah tangga miskin terhadap fluktuasi harga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan diskusi mengenai pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode studi, dapat disimpulkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam tingkat pengangguran akan meningkatkan jumlah orang miskin sebesar 0,0419 persen. Meningkatnya pengangguran berdampak langsung pada penurunan pendapatan rumah tangga dan daya beli, sehingga meningkatkan jumlah orang miskin. Temuan ini sejalan dengan teori Todaro (2000) dan penelitian oleh Nasution dan Lubis (2023), yang menyatakan bahwa pengangguran adalah salah satu penyebab utama meningkatnya kemiskinan di suatu daerah.

Selain itu, inflasi telah terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Setiap kenaikan inflasi sebesar 1 persen dapat meningkatkan jumlah orang miskin sebesar 0,0722 persen. Kenaikan harga kebutuhan pokok tanpa peningkatan pendapatan riil yang sebanding menyebabkan penurunan daya beli, terutama

di kalangan kelompok berpendapatan rendah. Ini memperburuk kesejahteraan orang miskin. Hasil penelitian ini konsisten dengan pandangan Mankiw (2003) dan Sari dan Ginting (2022), yang menjelaskan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap atau rendah.

Secara bersamaan, inflasi dan pengangguran secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai probabilitas uji-F sebesar $0,000 < 0,05$. Kedua variabel makroekonomi ini bersama-sama menjelaskan 66,84% variasi tingkat kemiskinan, sementara 33,16% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja. Namun, terdapat kesenjangan penelitian dengan beberapa studi sebelumnya, seperti Siregar (2020) dan Hutabarat (2020), yang menunjukkan hasil yang berbeda di daerah lain. Ini menegaskan bahwa pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap kemiskinan bersifat kontekstual, tergantung pada struktur ekonomi regional, kekuatan sektor informal, dan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan tekanan ekonomi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, M., & Arizal, M. (2025). Faktor-Faktor Sosioekonomi yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(3), 102–114.
- Hutabarat, F. B., Lubis, E. H., & Suharianto, J. (2025). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatra Utara (2001-2023). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 5667–5677. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2847>
- Ise, N. F., Kawung, G. M. V., & Rorong, I. P. F. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Manado Periode 2007 –2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 97–108.
- Lestari, I. D., & Nilasari, A. (2025). Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 483–493. <https://doi.org/10.36985/ywmawh84>
- Mardiatillah, R., Panorama, M., & Sumantri, R. (2021). Pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di sumatera selatan tahun 2015-2019. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 18(2), 279–287. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i2.9139>
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 212–222. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1034>
- Ningsih, W. W. (2019). *Peningkatan Kemampuan Mengenal Warna Dasar Melalui Metode Permainan Kartu Warna Pada Anak Roudlotul Athfal As Sholihat Cangkringturi Prambon Sidoarjo Tahun Pelajaran 2018/2019*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Novianto, S. (2018). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*.
- Primandari, N. R. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 1–10.

- Primandari, N. R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004–2018. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 25–34.
- Priyanto, D. (2005). *Analisis pengaruh PMA, PMDN dan laju inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 1990-2003*.
- Rizani, A., Norrahman, R. A., Harsono, I., Yahya, A. S., & Syifa, D. M. (2023). Efek Inflasi terhadap Daya Beli Masyarakat pada Tinjauan Ekonomi Makro. *Journal Of International Multidisciplinary Research Vol, 1*(2). <https://doi.org/10.36985/ywmawh84>
- Rumate, V. A., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh tingkat inflasi, investasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di provinsi sulawesi utara. *Jurnal Pembangunan Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 116005. <https://doi.org/10.36985/ywmawh84>
- Sangkaen, D., Masinambow, V. A. J., & Engka, D. S. M. (2018). Analisa Pengaruh Inflasi Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2).
- Sari, L. N. I., & Wulansari, L. (2022). Variabel-variabel yang Memengaruhi Deindustrialisasi. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2022(1), 1125–1134. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2022i1.1362>
- Sembiring, I. P. S., Simanjuntak, S., & Sitepu, V. A. (2021). Pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2006–2020. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 1–13.
- Utomo, F. W. (2012). Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).